



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP**

PERDES

NOMOR 2 TAHUN 2023

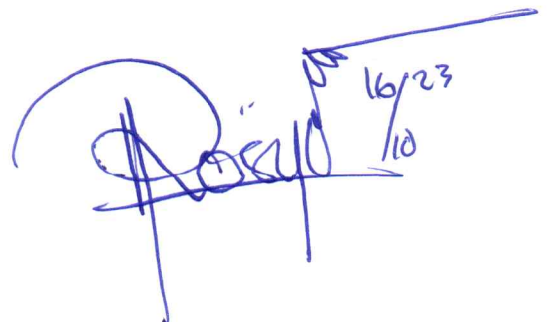
TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP)
TAHUN 2024**





RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024


16/23
110

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-8
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.....	III-6
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023.....	III-10
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....	III-13
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023.....	III-15
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023.....	III-16
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP

PERATURAN DESA KENEP
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Kenep Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kenep Tahun 2017 Nomor 01);
22. Peraturan Desa Kenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kenep

Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kenep Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENEP
dan
KEPALA DESA KENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kenep.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kenep dibantu Perangkat Desa Kenep sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kenep.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kenep.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kenep.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Kenep untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kenep.

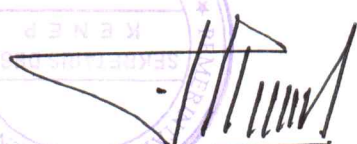
Ditetapkan di Kenep
pada tanggal 26 September 2023

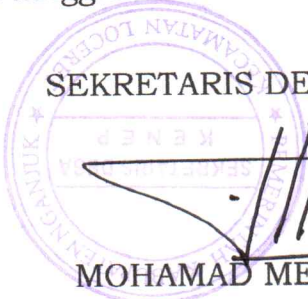
KEPALA DESA KENEP

JOKO SUSANTO



Diundangkan di Kenep
pada tanggal Oktober 2023

SEKRETARIS DESA KENEP

MOHAMAD MESRANTO



LEMBARAN DESA KENEP TAHUN 2023 NOMOR 02

LAMPIRAN

PERATURAN DESA KENEP

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Kenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kenep Tahun 2019-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Kenep ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kenep serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 1.874.499.750,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang berasal dari:

**PROYEKSI PENDAPATAN DESA KENEP
TAHUN 2024**

Kode Rek.	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan	Proyeksi	
		2023	2024	
4.	Pendapatan	2.079.564.780	1.874.499.750	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	452.950.000	452.950.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset	432.950.000	432.950.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	20.000.000	20.000.000	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.626.614.780	1.421.549.750	
4.2.1.	Dana Desa	848.611.000	891.040.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	57.884.380	57.884.380	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	450.119.400	472.625.370	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	270.000.000		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	-	-	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	2.079.564.780	1.874.499.750	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyeksi Belanja Desa Kenep sebesar Rp. 1.874.499.750,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	
		BERJALAN 2023	PROYEKSI 2024
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	974.753.285,45	967.299.750,00
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	872.153.400,00	802.375.370,00
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	34.000.000,00
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	256.030.680,00	256.000.000,00
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.398.800,00	33.000.000,00
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	115.365.960,00	62.925.370,00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	12.000.000,00
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.795.000,00	12.500.000,00
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.540.000,00	30.000.000,00
1.1.90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	361.950.000,00	361.950.000,00
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	46.327.885,00	66.884.380,00
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.500.000,00	46.884.380,00
1.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	29.827.885,00	20.000.000,00
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	4.225.000	15.000.000,00

	Statistik dan Kearsipan		
1.3.2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.375.000,00	5.000.000,00
1.3.3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		5.000.000,00
1.3.5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.850.000,00	5.000.000,00
1.3.6	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan		-
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.917.000,00	42.040.000,00
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		5.000.000,00
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)		5.000.000,00
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.900.000,00	5.000.000,00
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes, APBDdes Perubahan, LPJ dll)	892.000,00	5.000.000,00
1.4.5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.425.000,00	5.000.000,00
1.4.6	Penyusunan Kebijakan Desa		5.000.000,00
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintah Desa		3.000.000,00
1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	600.000,00	4.040.000,00
1.4.90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa		
1.4.91	Forum Pembina Desa	5.100.000,00	5.000.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan	41.130.000,00	41.000.000,00
1.5.1	Sertifikasi Tanah Kas Desa		5.000.000,00
1.5.4	Mediasi Konflik Pertanahan		5.000.000,00
1.5.6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.030.000,00	26.000.000,00
1.5.7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	15.100.000,00	5.000.000,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	823.219.000,00	582.000.000,00
2.1	Sub Bidang Pendidikan	57.500.000,00	88.000.000,00
2.1.1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	49.500.000,00	35.000.000,00
2.1.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		10.000.000,00
2.1.3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		10.000.000,00
2.1.5	Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madarasah Non Formal Milik Desa	8.000.000,00	13.000.000,00
2.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/		5.000.000,00

2.1.7	Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madarasah Non Formal Milik Desa		-
2.1.8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)		5.000.000,00
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		5.000.000,00
2.1.90	Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Pendidikan Desa		5.000.000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	342.720.000,00	119.000.000,00
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	600.000,00	31.000.000,00
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	69.120.000,00	55.000.000,00
2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		3.000.000,00
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	270.000.000,00	10.000.000,00
2.2.5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa		2.000.000,00
2.2.6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.800.000,00	3.000.000,00
2.2.8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		3.500.000,00
2.2.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **		3.500.000,00
2.2.90	Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Kesehatan Desa		8.000.000,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	389.999.000,00	300.000.000,00
2.3.1	Pemeliharaan Jalan Desa		-
2.3.2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		-
2.3.3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		15.000.000,00
2.3.4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		15.000.000,00
2.3.5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)		-
2.3.6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		-
2.3.7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		-
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa	274.999.000,00	
2.3.11	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang/Pavingisasi Jalan		75.000.000,00
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani(Dipilih)	75.000.000,00	80.000.000,00
2.3.13	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Milik Desa		15.000.000,00
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa(Gorong, selokan dll)	10.000.000,00	-
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitas Pemakaman		

	Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan(Drainase makam)		-
2.3.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.000.000,00	100.000.000,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	24.000.000,00	25.000.000,00
2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	10.000.000,00	10.000.000,00
2.4.5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman/Bank Sampah/Sarana Tosa		5.000.000,00
2.4.10	Pembangunan/Peningkatan Sumur Resapan (SUMUR DALAM)	5.000.000,00	5.000.000,00
2.4.13	Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman/Resapan		5.000.000,00
	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum	9.000.000,00	
2.4.15	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		50.000.000,00
2.4.18	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		-
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		-
2.5.2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		
2.5.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	-
2.6.1	Pembuatan Rambu-rambu Lalu Lintas	9.000.000,00	-
2.6.2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		-
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	94.831.000,00	172.700.000,00
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.750.000,00	23.500.000,00
3.1.1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	750.000,00	10.000.000,00
3.1.2	Penguatan dan Peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlimas Desa)		5.000.000,00
3.1.3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		2.000.000,00
3.1.4	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		5.000.000,00
3.1.5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1.000.000,00	
3.1.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		1.500.000,00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	60.765.000,00	94.000.000,00
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	57.500.000,00	70.000.000,00
3.2.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		4.000.000,00

3.2.5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	3.265.000,00	15.000.000,00
3.2.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan		5.000.000,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.200.000,00	6.200.000,00
3.3.6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.200.000,00	6.200.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.116.000,00	49.000.000,00
3.4.1	Pembinaan Lembaga Adat		5.000.000,00
3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.116.000,00	13.000.000,00
3.4.3	Pembinaan PKK	9.700.000,00	11.500.000,00
3.4.4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000,00	10.000.000,00
3.4.5	Fakir Miskin		3.000.000,00
3.4.90	Pembinaan Karang Taruna		6.500.000,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	99.900.000,00	58.500.000,00
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	96.400.000,00	25.000.000,00
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi / pengelolaan / penggilingan)/Ketahanan Pangan	30.000.000,00	
4.2.3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa/Lumbung Desa		10.000.000,00
4.2.4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	65.000.000,00	15.000.000,00
4.2.5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan/Ketahanan Pangan	1.400.000,00	
4.2.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		10.500.000,00
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		3.000.000,00
4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		6.000.000,00
4.3.3	Peningkatan Kapasitas BPD		1.500.000,00
4.4	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000,00	9.000.000,00
4.4.1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		3.000.000,00
4.4.2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		3.000.000,00
4.4.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.000.000,00	3.000.000,00
4.5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		5.000.000,00
4.5.2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		5.000.000,00
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	500.000,00	9.000.000,00
4.6.1	Pembentukan BUM Desa	500.000,00	5.000.000,00
4.6.2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)		2.000.000,00

4.6.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal		2.000.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	105.800.000,00	94.000.000,00
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	10.000.000,00
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		10.000.000,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	74.000.000,00
	Jumlah Total Belanja	2.098.503.285,45	1.874.499.750

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Kenep
Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	18.938.505,45		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	18.938.505,45		
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DESA

- Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:
- 1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
 - 2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>950.719.870 ,00</u>	<u>974.753.285,45</u>
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>854.819.879,00</u>	<u>872.153.400,0</u>
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.000.000,00	33.972.000,00
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	281.000.000,00	256.030.680,00
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.000.000,00	23.398.800,00
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	60.619.870,00	115.365.960,00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	14.000.000,00	17.100.000,00

1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.500.000,00	5.795.000,00
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.000.000,00	33.540.000,00
1.1.8	Penyediaan operasional Pemdes Yng bersumber Dari DD	0,00	25.000.000,00
1.1.90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	395.700.000,00	361.950.000,00
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<u>35.900.000,00</u>	<u>46.327.888,45</u>
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35.900.000,00	16.500.000,00
1.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	29.827.885,45
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>19.000.000,00</u>	<u>4.225.000,00</u>
1.3.2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	2.375.000,00
1.3.3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.000.000,00	0,00
1.3.5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	1.850.000,00
1.3.6	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan	5.000.000,00	0,00
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>55.000.000,00</u>	<u>10.917.000,00</u>
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	8.000.000,00	0,00
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.000.000,00	<u>0,00</u>
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.000.000,00	1.900.000,00
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000,00	892.000,00
1.4.5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.500.000,00	1.425.000,00
1.4.6	Penyusunan Kebijakan Desa	2.500.000,00	0,00

1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah Desa	4.000.000,00	0,00
1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000,00	600.000,00
1.4.91	Forum Pembina Desa	5.000.000,00	5.100.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan	<u>20.000.000,00</u>	<u>41.130.000,00</u>
1.5.1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	0,00
1.5.6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	26.030.000,00
1.5.90	Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	0,00	15.100.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 24 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 20 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 83%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Target Output	Realisai Output	Kesimpulan (Tercapai/ Tidak Tercapai)
1	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>974.753.285,45</u>	<u>137.612.880,00</u>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>872.153.400,0</u>	<u>135.862.880,00</u>	
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	11.324.320,00	Tercapai
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	256.030.680,00	85.343.580,00	Tercapai
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.398.800,00	0,00	Belum Tercapai
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	115.365.960,00	9.800.000,00	Tercapai
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	5.700.000,00	Tercapai
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.795.000,00	3.695.000,00	Tercapai
1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.540.000,00	10.000.000,00	Tercapai
1.1.8	Penyediaan operasional Pemdes Yng bersumber Dari DD	25.000.000,00	10.000.000,00	Tercapai
1.1.90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	361.950.000,00	0.00	Belum Tercapai
1.2	<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>46.327.888,45</u>	<u>0.00</u>	
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.500.000,00	0.00	Belum Tercapai
1.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Gedung/	29.827.885,45	0.00	Belum Tercapai

	Prasarana Kantor Desa			
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>4.225.000,00</u>	<u>0.00</u>	
1.3.2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.375.000,00	0.00	Belum Tercapai
1.3.5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.850.000,00	0.00	Belum Tercapai
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>10.917.000,00</u>	<u>0.00</u>	
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.900.000,00	0.00	Belum Tercapai
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	892.000,00	0.00	Belum Tercapai
1.4.5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	0.00	Belum Tercapai
1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	600.000,00	0.00	Belum Tercapai
1.4.91	Forum Pembina Desa	5.100.000,00	1.750.000,00	Tercapai
1.5	Sub Bidang Pertanahan	<u>41.130.000,00</u>	<u>0.00</u>	
1.5.6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.030.000,00	0.00	Belum Tercapai
1.5.90	Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15.100.000,00	0.00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 8 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 12 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.140.000.000,00	823.219.000,00
2.1	Sub Bidang Pendidikan	<u>77.500.000,00</u>	<u>57.500.000,00</u>
2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.500.000,00	49.500.000,00
2.1.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	10.000.000,00	0,00
2.1.5	Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madarasah Non Formal Milik Desa	13.000.000,00	8.000.000,00
2.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	5.000.000,00	0.00
2.1.7	Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madarasah Non Formal Milik Desa	4.000.000,00	0.00
2.1.8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.000.000,00	0.00
2.1.12	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00	0.00
2.1.90	Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Pendidikan Desa	5.000.000,00	0,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	<u>93.500.000,00</u>	<u>342.720.000,0</u>
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	20.000.000,00	600.000,00
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.000.000,00	69.120.000,00
2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.000.000,00	0.00
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.000.000,00	271.200.000,00
2.2.6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	1.800.000,00

2.2.8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.000.000,00	0,00
2.2.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3.500.000,00	0,00
2.2.90	Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Kesehatan Desa	15.000.000,00	0,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>454.000.000,00</u>	<u>389.999.000,00</u>
2.3.1	Pemeliharaan Jalan Desa	348.000.000,00	0,00
2.3.2	Pemeliharaan Jalan Pemukiman	100.000.000,00	0,00
2.3.3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	55.500.000,00	0,00
2.3.10	Pembangunan/Peningkatan jalan Desa	0,00	274.999.000,00
2.3.11	Pembangunan/Peningkatan jalan lingkungan pemukiman, gang, pavingisasi jalan	7.500.000,00	0,00
2.3.12	Pembangunan /rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JUT	10.000.000,00	75.000.000,00
2.3.13	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Milik Desa	8.000.000,00	0,00
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan	0,00	10.000.000,00
2.3.16	Pembangunan/rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Drainase Makam	15.000.000,00	0,00
2.3.99	Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum	0,00	30.000.000,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>11.000.000,00</u>	<u>24.000.000,0</u>
2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap/RTLH	0,00	10.000.000,00
2.4.10	Pembangunan/Rehap/Peningkatan Sumur Resapan	0,00	5.000.000,00
2.4.13	Pembangunan/peningkatan Sanitasi pemukiman/resapan	2.000.000,00	0,00
2.4.14	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	0,00	9.00.000,000
2.4.18	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	9.000.000,00	0,00
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	<u>1.000.000,00</u>	<u>9.000.000,0</u>
2.6.1	Pembuatan Rambu-Rambu Di Jalan Desa	0,00	9.000.000,00
2.6.2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.000.000,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023

sebanyak 26 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 14 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 54 %.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Target Output	Realisai Output	Kesimpulan (Tecapai/ Tidak Tercapai
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	823.219.000,00	126.820.000,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	<u>57.500.000,00</u>	<u>20.500.000,00</u>	
2.1.1	<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ / Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</i>	49.500.000,00	12.500.000,00	Tercapai
2.1.5	<i>Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ / Madarasah Non Formal Milik Desa</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	Tercapai
2.2	Sub Bidang Kesehatan	<u>342.720.000,0</u>	<u>23.320.000,0</u>	
2.2.1	<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)</i>	600.000,00	0,00	Belum tercapai
2.2.2	<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,</i>	69.120.000,00	22.720.000,00	Tercapai

	<i>Lamsia, Insentif)</i>			
2.2.4	<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	271.200.000,00	271.200.000,00	Tercapai
2.2.6	<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	Tercapai
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>389.999.000,0</u>	<u>389.999.000,0</u>	
2.3.10	<i>Pembangunan/ Peningkatan jalan Desa</i>	274.999.000,00	274.999.000,00	Tercapai
2.3.12	<i>Pembangunan /rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan JUT</i>	75.000.000,00	20.000.000,00	Tercapai
2.3.14	<i>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	Tercapai
2.3.99	<i>Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	Tercapai
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>24.000.000,00</u>	<u>24.000.000,00</u>	
2.4.1	<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehap/ RT LH</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	Tercapai
2.4.10	<i>Pembangunan/ Rehap/ Peningkatan Sumur Resapan</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	Tercapai
2.4.14	<i>Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN</i>	9.00.000,000	9.00.000,000	Tercapai
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	<u>9.000.000,0</u>	<u>9.000.000,00</u>	
2.6.1	<i>Pembuatan Rambu-Rambu Di Jalan Desa</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai 13 kegiatan.
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai 0 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
3	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>130.500.000,00</u>	<u>94.831.000,00</u>
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>18.500.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>
3.1.1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	15.000.000,00	750.000,00
3.1.4	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.000.000,00	0,00
3.1.5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	1.000.000,00
3.1.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.500.000,00	0,00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>9.000.000,00</u>	<u>60.765.000,00</u>
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	60.000.000,00	57.500.000,00
3.2.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	4.000.000,00	0,00
3.2.5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	10.000.000,00	3.265.000,00
3.2.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	0,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>3.000.000,00</u>	<u>6.200.000,00</u>
3.3.6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	6.200.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>30.000.000,00</u>	<u>26.116.000,00</u>

3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000,00	10.116..000,00
3.4.3	Pembinaan PKK	10.000.000,00	9.700.000,00
3.4.4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	6.300.000,00
3.4.90	Pembinaan Karang Taruna	7.000.000,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 12 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 8 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 66,7%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Target Output	Realisai Output	Kesimpulan (Tecapai/ Belum/ Tidak Tercapai
3	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>94.831.000,00</u>	<u>14.065.,00,00</u>	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>1.750.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.1	Pengadaan/ Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	750.000,00	0,00	Belum Tercapai
3.1.5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.000.000,00	0,00	Belum Tercapai

3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>60.765.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	57.500.000,00	0,00	Belum Tercapai
3.2.5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	3.265.000,00	3.265.000,00	Tercapai
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>6.200.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	
3.3.6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.200.000,00	400.000,00	Tercapai
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>26.116.000,00</u>	<u>10.400.000,00</u>	
3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.116.000,00	7.900.000,00	Tercapai
3.4.3	Pembinaan PKK	9.700.000,00	400.000,00	Tercapai
3.4.4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000,00	2.100.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 3 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>55.500.000,00</u>	<u>99.900.000,00</u>
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>40.000.000,00</u>	<u>96.400.000,00</u>
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,00	30.000.000,00
4.2.3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung	30.000.000,00	0,00
4.2.4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	65.000.000,00
4.2.5	Pelatihan Teknologi tepat Guna/Ketahanan Pangan	0,00	1.4000.000,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>10.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	0,00
4.3.2	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	6.000.000,00	0,00
4.3.3	Peningkatan Kapatitas BPD	1.500.000,00	0,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>0,00</u>	<u>3.000.000,00</u>
4.4.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	3.000.000,00
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>
4.6.2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	0,00	500.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 5 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Target Output	Realisai Output	Kesimpulan (Tercapai/ Tidak Tercapai
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	99.900.000,00	85.000.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>96.400.000,00</u>	<u>85.000.000,00</u>	
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	30.000.000,00	30.000.000,00	Tercapai
4.2.4	<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana</i>	<i>65.000.000,00</i>	<i>55.000.000,00</i>	Tercapai
4.2.5	Pelatihan Teknologi tepat Guna/Ketahanan Pangan	1.4000.000,00	0,00	Belum tercapai
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.90	<i>Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	Belum tercapai
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.2	<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0</i>	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai 3 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

- 1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	92.000.000,00	105.800.000,00
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>10.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00-</u>
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>72.000.000,00</u>	100.800.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 66,7 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Target Output	Realisai Output	Kesimpulan (Tercapai/ Tidak Tercapai
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	105.800.000,00	75.600.000,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>5.000.000,00</u>	=	Belum Tercapai
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>100.800.000,00</u>	<u>75.600.000,00</u>	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Kenep sebagai berikut:

- A. Permasalahan Bidang Pemerintahan Desa
 - 1. Sumber keuangan desa relative kecil
 - 2. Kondisi Kantor desa yang kurang memadai
- B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa
 - 1. Besarnya capaian wilayah yang akan dibangun.

2. Untuk pembangunan taman bermain belum memiliki aset yang digunakan untuk membangun
 3. Transfer dana yang dilakukan akhir tahun, sehingga waktu pembangunan berbarengan dengan kegiatan panen, sehingga tenaga kerja sulit didapatkan dari warga desa.
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Kurangnya Fasilitas Keamanan Lingkungan
 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai.
 3. Kurangnya Pembinaan Ketrampilan Pemuda/ Karangtaruna
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Pelatihan teknologi tepat guna
 2. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa
- E. Permasalahan Bidang Tanggap Bencana
1. Anggaran yang kurang
 2. Fasilitas tanggap bencana yang kurang / belum ada

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Kenep yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2024.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 3) RKP Desa Tahun 2024
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - c. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - f. Penyediaan Tunjangan BPD
 - g. Penyediaan Operasional BPD
 - h. Penyediaan Insentif RT/RW
 - i. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - j. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa
 - k. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - l. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - m. Forum Pembina Desa
 - n. Sertifikasi Tanah Kas Desa

- o. Penyusunan Produk Hukum Desa
 - p. Pembangunan/Pemeliharaan sarana prasarana kantor desa
 - q. Pembangunan dan pengembangan informasi public melalui website desa dan pemeliharaan jaringan internet
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan
 - b. Pembangunan kualitas jalan usaha tani
 - c. Pemerataan pembangunan prasarana dasar pemukiman
 - d. Pembangunan penahan jalan
 - e. Peningkatan drainase jalan
 - f. Pemeliharaan Gedung, peralatan dan perlengkapan Posyandu, Polindes, PAUD
 3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Pembinaan Kader Kesehatan Desa
 - b. Sosialisasi pencegahan/pengurangan Stunting, AKI, AKB
 - c. Pengadaan alat permainan edukasi PAUD Desa
 4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Penyertaan modal BUMDes
 - b. Penanaman pohon penghijauan pelindung tepi jalan
 - c. Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB), Kampung Donor Darah
 - d. Kegiatan pelatihan usaha untuk buruh tani
 - e. Pelatihan usaha bagi warga yang memiliki potensi keahlian/keterampilan usaha untuk menumbuhkan wirausaha baru
 - f. Bantuan peralatan bagi peserta pelatihan usaha
 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanganan Covid 19
 - b. Blt DD
 - c. Bansos

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Pendataan penduduk
4. Kerjasama antar desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

5. Pendataan Aset Desa dengan Aplikasi Sipades
6. Pendataan Covid dengan aplikasi eDMC
7. Pendataan Konvergensi Stunting dengan aplikasi eHDW

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024

(Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024

: KENEP
: LOCERET
: NGANJUK
: JAWA TIMUR

AMATAN
UPATEN
/INSI

	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke N	Waktu Pelaksana an	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan					
		Nama Program /Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
	Bidang		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Penyelenggaraan Pemerintahan																
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1 Orang	1 Orang	2024	Kenep	12 Bulan	1 Orang	34.000.000	ADD	✓			
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	10 Orang	11 Orang	2024	Kenep	12 Bulan	10 Orang	240.000.000	ADD	✓			
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	11 Orang	13 Orang	2024	Kenep	12 Bulan	11 Orang	33.000.000	ADD	✓			
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	11 Orang	13 Orang	2024	Kenep	12 Bulan	11 Orang	71.949.750	ADD	✓			
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	5 Orang	5 Orang	2024	Kenep	12 Bulan	5 Orang	14.000.000	ADD	✓			
			6	Penyediaan Operasional BPD	18	5 Orang	5 Orang	2024	Kenep	12 Bulan	5 Orang	6.500.000	ADD	✓			
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	25 Orang	25 Orang	2024	Kenep	12 Bulan	25 Orang	30.000.000	ADD	✓			
			8	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	9 Orang	9 Orang	2024	Kenep	12 Bulan	9 Orang	361.950.000	PAD	✓			
			9	Pemilihan Kepala Desa	1,2,3,18												
			10	Pengisian Sekretaris Desa	1,2,3,18												
			11	Pengisian Perangkat Desa	1,2,3,18												
			12	Pembentukan BPD	1,2,3,18												
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	100 Orang	25.000.000	ADD	✓			
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	2 Paket	3 Paket	2024	Kenep	1 Paket	20 Orang	20.000.000	BHPRD				
			3	Pembangunan Gedung/Rehabilitasi Pendopo (Plafon, Genting, Paving)	9,18												
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,18												
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa + SDGs	1,18	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	31 Orang	5.000.000	DD	✓			
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	13 Orang	4.000.000	DD	✓			
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10,16												
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	31 Orang	5.000.000	DD	✓			

Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke N	Waktu Pelaksana an	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)								Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
		6 kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1,5,8,11	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	62 Orang	5.000.000	DD	✓			
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17,18	7 Kali	7 Kali	2024	Kenep	1 Paket	50 Orang	8.000.000	DD	✓			
		2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18	2 Kali	2 Kali	2024	Kenep	1 Paket	50 Orang	6.000.000	DD		✓		
		3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	70 Orang	8.000.000	DD		✓		
		4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	13 Orang	5.000.000	DD		✓		
		5 Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	13 Orang	2.500.000	DD		✓		
		6 Penyusunan Kebijakan Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	11 Orang	2.500.000	DD		✓		
		7 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16, 18	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	11 Orang	3.000.000	DD		✓		
		8 Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	100 Orang	1.000.000	DD		✓		
	9 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	17, 18													
	11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	18													
	12 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	18								10.000.000					
5	Sub Bidang Pertanahan	13 Forum Pembina Desa	11,16,17,18	50 Orang	50 Orang	2024	Kenep	1 Paket	50 Orang	5.000.000	DD		✓		
		1 Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	20 Orang	5.000.000	DD		✓		
		2 Administrasi Pertanahan	18												
		3 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10, 16												
		4 Mediasi Konflik Pertanahan	10, 16												
		5 Penyuluhan Pertanahan	10, 16												
		6 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	6 Orang	9 Orang	2024	Kenep	1 Paket	9 Orang	20.000.000	BHPRD		✓		
		7 Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	10, 16												
		90 Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	10, 16												
												931.399.750			
Jumlah Bidang 1															
Pelaksanaan Pembangunan															
		1 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	100 Orang	30.500.000	DD	✓			
	2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,5,10	20 Orang	20 Orang	2024	Kenep	1 Paket	1 Paket	20 Orang	10.000.000	DD	✓			
	3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4,5,10													
	4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	4,5,10													
	5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	4,9,10	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	1 Paket	30 Orang	25.000.000	DD	✓			

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke N	Waktu Pelaksana an	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Phak Ketiga	
1	Pendidikan	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	10 Orang	DD	✓			
		7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	30 Orang	DD		✓		
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada an Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Desa**	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	30 Orang	DD		✓		
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	4,9										
		10	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,9										
		11	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4,9										
		12	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1,4	18 Orang	20 Orang	2024	Kenep	1 Paket	18 Orang	DD		✓	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	1,4	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	18 Orang	DD		✓	
		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif Kader, KB dsb)	3,10,11,16	80 Orang	80 Orang	2024	Kenep	1 Paket	80 Orang	DD		✓	
		2	Penyelenggaraan Posyandu (PMT LANSIA,REMAJA, BALITA)	3,10,11,16	80 Orang	80 Orang	2024	Kenep	1 Paket	80 Orang	DD		✓	
2	Kesehatan	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	50 Orang	DD		✓		
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	30 Orang	DD		✓		
		5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,6,10,11,16	10 Orang	10 Orang	2024	Kenep	1 Paket	10 Orang	DD		✓	
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3,6,10,11,16										
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,6,10,11,16	100 Orang	100 Orang	2024	Kenep	1 Paket	100 Orang				
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada an Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,9	100 Orang	100 Orang	2024	Kenep	1 Paket	100 Orang	DD			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	3,9	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	100 Orang	DD		✓	
		1	Pemeliharaan Jalan Desa (HOTMIX)	3,5,8,9,10,11,15										
		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Drainase	3,5,8,9,10,11,15										
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani / Pengurugan	3,5,8,9,10,11,15	900 m	2000 m	2024	Dukuhan	690 M	100 Orang	DD		✓	
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa											
		5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa / Gorong-gorong	3,5,8,9,10,11,15	5 unit	10 Unit	2024	Kenep	1 Unit	150 Orang	DD			

[illegible]

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
									Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
8	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8,9											
		2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8,9											
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8,9											
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata												
Jumlah Bidang 2															
Pembinaan Kemasyarakatan Desa															
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	2000 Orang	DD	✓			
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	60 Orang	DD	✓			
		3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	60 Orang	DD	✓			
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,15	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	60 Orang	DD	✓			
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	9,11,15	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	60 Orang	DD	✓			
		6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1,4											
		7	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	4,10											
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4,10	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	30 Orang	DD	✓			
		2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,16,18									
2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten			4,16,18											
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa (HUT RI dan Keagamaan)			4,16,18	1 Kali	2 Kali	2024	Kenep	2 Kali	2400 Orang	DD/PAD	✓			
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa/ Satir Mandi Jenazah			4,16,18	1 Paket	2 Paket	2024	Kenep	1 Paket	200 Orang	DD	✓			
5	Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa			4,16,18	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	800 Orang	PAD	✓			
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*			4,16,18	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	30 Orang	DD	✓			

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan							
Bidang	Nama Program/ Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga					
3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	4,16,18														
		2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	4,16,18														
		3	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	4,16,18														
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	4,16,18														
		5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	4,16,18														
		6	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	4,16,18	1 Paket	1 Paket	2024	Kenep	1 Paket	50 Orang	3.000.000	DD	✓					
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga															
		4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	4,5,18												
				2	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	4,5,18	1 kali	2 Kali	2024	Kenep	1 Paket	40 Orang	10.000.000	DD	✓			
3	Pembinaan PKK			4,5,18	1 Kali	2 Kali	2024	Kenep	1 Paket	80 Orang	10.000.000	DD	✓					
4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			4,5,18	1 Kali	2 Kali	2024	Kenep	1 Paket	60 Orang	3.000.000	DD	✓					
		5	Fakir Miskin	4,5,18	1 Kali	2 Kali	2024	Kenep	1 Paket	60 Orang	3.000.000	DD	✓					
		90	Pembinaan Karang Taruna	4,5,18	1 Kali	2 Kali	2024	Kenep	1 Paket	60 Orang	7.000.000	DD	✓					
			Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan dan Masyarakat							-								
Jumlah Bidang 3													165.500.000					
Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
1	Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa	8,12,15														
		2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa	8,12,15														
		3	Pembangunan / Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa	8,12,15														
		4	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa	8,12,15														
		5	Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dst)	8,12,15														
		6	Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan	8,12,15														
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan															
		1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,2,3,5,8,12														
		2	Peningkatan Produksi Peternakan	1,2,3,5,8,12														
2	Pertanian dan Peternakan	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa / Lumbung Desa/ Normalisasi sungai dan Irigasi	1,2,3,5,8,12	500 m	1000 m	2024	Kenep	1000 m	100 Orang	18.000.000	DD	✓					

Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke N	Waktu Pelaksana an	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan					
Bidang		Nama Program/ Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
		4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana/ Pintu Saluran	3,8,9,12,15	5 titik	2024	Kenep	5 Titik	100 Orang	40.000.000	DD	✓					
		5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan * (Pembuatan Bio Gas)	1,2,3,4,5,8,9,12													
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*														
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	1	2024	Kenep	1 orang	1	2.000.000	DD	✓					
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	10	2024	Kenep	1 orang	4	6.000.000	DD	✓					
		3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	5	2024	Kenep	1 orang	1	1.500.000	DD	✓					
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4,5,17,18													
		2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	4,5,17,18													
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	4,5,17,18													
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,5,17,18	30	2024	Kenep	30 orang	30	4.000.000	DD	✓					
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	1,3,4,5,8,10													
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	1,3,4,5,8,10													
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	1,3,4,5,8,10													
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa	1,3,4,5,8,10													
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,8,10													
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,3,4,5,8,10	1 Kali	2 Kali	2024	Kenep	1 Paket	30 Orang	4.000.000	DD	✓				
7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa	1,3,4,5,8,9,10,12													
		2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa	1,3,4,5,8,9,10,12													
		3	Pengembangan Industri kecil level Desa	1,3,4,5,8,9,10,12	1 Kali	2 Kali	2024	Kenep	1 Paket	30 Orang	3.000.000	DD	✓				
		4	Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi	1,3,4,5,8,9,10,12													
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian														
										Jumlah Bidang 4							
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa																	
1	Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9,15	50 Orang	2024	Kenep	1 Paket	50 Orang		5.000.000	DD	✓				

Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke		Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
Bidang		Nama Program/Kegiatan									Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
2	Kadaan Darurat	2	Kadaan Darurat	1,2,3,4,5,9,15	60 Orang	60 Orang	2024	Kenep	1 Paket	60 Orang	5.000.000	DD	√		
3	Kadaan Mendesak	3	Kadaan Mendesak.	1,2,3,4,5,9,15	101 Orang	25 Orang	2024	Kenep	1 Paket	30 Orang	85.000.000	DD	√		
Jumlah Bidang 5											95.000.000				
JUMLAH TOTAL											1.873.499.750				

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).


KEPALA DESA KENEP
JOKO SUSANTO